Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-4 Juni
(19 s.d. 25 Juni 2023)
2023

PENCABUTAN STATUS PANDEMI COVID-19

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

Efendi
Analis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rabu, 21 Juni 2023, Presiden mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19. Selanjutnya Indonesia akan memasuki masa endemi. Perubahan status ini akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023. Pencabutan status pandemi Covid-19 ke endemi setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 5 Mei 2023 lalu menyatakan, bahwa Covid-19 tidak lagi menjadi darurat kesehatan global. Bagi Indonesia, dengan kebijakan pencabutan status ini berarti mengakhiri berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selanjutnya, Pemerintah akan menerbitkan Keppres untuk mengatur penyesuaian masa transisi dari pandemi ke endemi. Perubahan status dari pandemi ke endemi secara otomatis akan diikuti dengan pembubaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan tugas-tugas Satgas akan dikembalikan ke kementerian/lembaga terkait, diantaranya terkait program vaksinasi.

Perubahan status dari pandemi Covid-19 menuju endemi dengan mempertimbangkan angka kasus terkonfirmasi harian di Indonesia yang mendekati nihil. Selain itu, hasil survei serologi atau antibodi Covid-19 menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. Meskipun telah beralih status dari pandemi ke endemi, Pemerintah tetap meminta kepada masyarakat untuk selalu hati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih karena fase endemi tidak menghilangkan penyebaran virus penyebab Covid-19.

Dampak dari perubahan status dari pandemi menjadi endemi adalah adanya pelimpahan kendali Covid-19 kepada masing-masing individu, termasuk skema pembiayaan perawatan pasien Covid-19, protokol kesehatan, hingga vaksinasi yang tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah. Sementara itu, skema pembiayaan perawatan pasien Covid-19 bagi masyarakat tidak mampu masih dalam proses transisi ke kelompok penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedangkan terkait dengan protokol kesehatan diserahkan kepada masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik di sektor transportasi, layanan pendidikan, maupun pengelola kawasan umum. Sedangkan program vasksinasi masih tetap berlanjut pada masa endemi melalui integrasi ke dalam program rutin Pemerintah sebagai upaya mitigasi jangka panjang.

Dalam memasuki fase endemi, para pakar bidang kesehatan berharap agar Pemerintah tetap memperhatikan kelompok masyarakat beresiko tinggi seperti lansia, penderita komorbid dan orang yang mengalami *imunosupresi* (gangguan imunitas). Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok ini adalah dengan memberikan jaminan terhadap akses vaksin dan ketersediaan obat. Selain itu, Pemerintah perlu menjaga surveilans, meningkatkan riset Covid-19, dan memberikan penyuluhan, informasi, serta pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat. Pemerintah juga diharapkan tetap menjamin ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan kelompok berisiko tinggi serta ketersediaan obat-obatan esensial dan oksigen untuk pengobatan Covid-19. Hal ini penting untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus di kemudian hari.

Atensi DPR

Meski status pandemi Covid-19 telah dicabut dan Indonesia telah memasuki fase endemi, namun Covid-19 masih ada. Oleh karenanya Komisi IX DPR RI perlu:

1. mendorong dan mengawasi Pemerintah dalam hal penanganan kesehatan terhadap kelompok masyarakat beresiko tinggi, seperti lansia, penderita komorbid dan orang yang mengalami *imunosupresi* (gangguan imunitas);
2. mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan surveilans, riset Covid-19, penyuluhan dan informasi, dan pemberian pelayanan kesehatan secara prima;
3. mendorong Pemerintah untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan kelompok beresiko tinggi serta ketersediaan obat-obatan esensial dan oksigen untuk pengobatan Covid-19; dan
4. mendorong Pemerintah meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 22 & 23 Juni 2023;
Kompas, 22 & 23 Juni 2023;
Kontan, 22 Juni 2023;
Media Indonesia, 22 & 23 Juni 2023;
Rakyat Merdeka, 23 Juni 2023.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023